



Partisipasi Pemilukada Ditarget 70 Persen

JOGJA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta memasang target partisipasi pemilih pada Pemilukada Jogja 2011 sebesar 70 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila tercapai, pemerintahan yang terbentuk nanti bakal cukup legitimate.

Hal tersebut dikemukakan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah, usai melantik 70 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilukada 2011 dari 14 kecamatan se-Jogja, di Ruang Pertemuan Utama Atas Balaikota Timoho, Kamis (24/3).

Menurutnya, partisipasi pemilih Pemilukada di DIY cukup tinggi. Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi pemilih pada 2010 di Surabaya di bawah 50 persen, di Medan malah cuma 32 persen dari DPT. Sementara dalam Pemilukada di tiga daerah di DIY, tingkat partisipasi di atas 70 persen. Sedangkan di Jogja, lanjutnya, tingkat partisipasi Pemilukada pada 2006 hanya 53 persen. Tingkat partisipasi membaik pada Pemilu legislatif 2009, sekitar 66 persen. Partisipasi kembali meningkat pada Pemilu Presiden 2009, menjadi hampir 70 persen.

"Harapan kami, untuk menciptakan pemerintahan yang legitimate, kita harus bisa mendorong masyarakat memahami bahwa Pemilukada itu penting. Bagaimanapun Pemilukada harus ada. Sehingga untuk partisipasi 2011 ini syukur-syukur lebih dari 70 persen," tegasnya.

Belajar dari Pemilukada Jogja 2006, sambung Nasrullah, masalah utama partisipasi pemilih bersumber dari administrasi kependudukan (Adminduk). Sebanyak 23 persen surat undangan dikembalikan, karena orangnya tidak ada. Dengan kata lain, orang tersebut masuk dalam DPT, namun tidak datang ke TPS karena sudah tidak berada di Jogja.

Pindah tanpa lapor

Menurut dia, hal tersebut disebabkan mobilitas penduduk Jogja sangat tinggi. Banyak orang masih memegang KTP Jogja atau namanya masuk dalam CI (Kartu Keluarga) Jogja, namun secara fisik sudah tidak berada di Jogja.

"Mereka pindah tanpa lapor, KTP-nya *nggak* dicabut, sehingga masih tercatat sebagai penduduk Jogja, sementara di tempat baru juga sudah punya kartu identitas. Belum lagi mahasiswa luar daerah yang *ngurus* Kipem atau identitas lain selama di Jogja, begitu studinya selesai, langsung pulang tanpa lapor," bebarnya.

Pada bagian lain, Nasrullah berharap Pemilukada Jogja tidak diwarnai konflik yang disebabkan permasalahan DPT. Untuk itu, KPU melibatkan para peserta Pemilukada dalam pencermatan data mentah pemilih yang dituangkan dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Dalam kesempatan itu, Walikota Yogyakarta H Herry Zudianto meminta para anggota PPK menjaga netralitas. Jangan sampai melupakan statusnya sebagai PPK dan malah terlibat politik praktis yang mencolok, sehingga masyarakat meragukan kinerja PPK. "Biaya sosialnya mahal, kalau sampai terjadi kekisruhan yang dipicu oleh rasa curiga itu," tegasnya.

Herry mengusulkan agar para anggota PPK memasang pin Bendera Merah Putih di dada kiri selama bekerja. Usul itu disepakati oleh para anggota PPK. "Kalau sudah pakai pin Merah Putih, itu akan mengalahkan bendera apapun," tandasnya. (fir)

>> KE HAL 7

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005